

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Inflation targeting framework (ITF) telah menjadi kerangka kebijakan moneter yang utama dalam mengatur kestabilan harga di Indonesia. Banyak penelitian menjelaskan bahwa kebijakan ini membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengendalikan *trade-off* inflasi dengan pertumbuhan *output* yang relatif rendah (Duong, 2022); Tawadros, (2009)). Semenjak menerapkan ITF performa ekonomi makro Indonesia juga memperlihatkan perkembangan. Ekspektasi inflasi menjadi lebih baik dengan adanya kerangka kerja ini sehingga membantu membentuk tingkat inflasi aktual yang lebih rendah (Hendar, 2016). Laporan bank dunia bahkan menjelaskan bahwa ketika perekonomian dunia menurun tajam dan terjadi krisis finansial global, Indonesia tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat (Word Bank, 2009). Hal ini menjadi salah satu tanda bahwa perekonomian Indonesia merespon secara baik kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah termasuk bank Indonesia sebagai otoritas kebijakan moneter (Maurer & Yesin, 2004).

Salah satu keunggulan ITF adalah penetapan target inflasi oleh bank sentral. Penetapan target ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, terarah, berkelanjutan dan yang lebih penting inflasi cenderung tidak fluktuatif. ITF menjadi strategi yang lebih baik tidak hanya untuk inflasi tetapi juga perekonomian secara makro. ITF dinilai lebih dapat mengontrol inflasi, mengurangi efek dari *inflationary shock* dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa fluktuasi *output* yang signifikan. Faktor inilah yang mewujudkan tingkat inflasi ataupun kondisi ekonomi secara riil yang lebih stabil dibawah ITF. Lebih lanjut, inflasi yang stabil menjadi modal positif bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Inflasi tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi sampai kepada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan variabel ekonomi makro lainnya (Mishkin, 2000; Batini et al., 2000; Nwoko et al., 2016; Thalassinos et al., 2012 dan Chaudhry et al., 2013).

Inflasi menjadi penting karena besarnya pengaruh inflasi terhadap variabel ekonomi lainnya. Hal ini menjadi alasan banyaknya penelitian tentang inflasi dan seberapa besar efek yang ditimbulkan. Salah satunya adalah efek inflasi terhadap ketimpangan dan sebaliknya. Fenomena inflasi dan ketimpangan pendapatan menjadi hal yang penting karena ketimpangan tidak hanya secara tidak langsung menggambarkan tingkat kemiskinan tetapi juga berpotensi mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, - yang didominasi oleh negara-negara berkembang-, umumnya memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang relatif stabil menjadi tidak berarti ketika tingkat ketimpangan semakin melebar. Banyak hasil penelitian bahkan menegaskan bahwa kesetaraan dan performa ekonomi yang optimal adalah dua hal yang seharusnya bersifat komplementer. Bercermin pada PDB atau pertumbuhan ekonomi saja tidak akan memberikan ukuran yang cukup untuk menilai kinerja ekonomi secara keseluruhan (Siringi dan Oiro, 2011; Bulir, 2001 dan Thalassinos et al., 2012).

Laporan Bank Dunia tahun 2016 merilis data bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat cepat disaat PDB riil per kapita Indonesia tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun antara 2000 dan 2014. Tingkat pertumbuhan tersebut mampu menekan angka kemiskinan menjadi 11% di 2011. Namun disisi lain tingkat pertumbuhan tersebut juga memicu peningkatan ketimpangan Indonesia bahkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia lebih tinggi dari negara-negara ASEAN selama dua dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi memang meningkatkan pendapatan masyarakat namun percepatan peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah dan atas lebih cepat dibandingkan dengan percepatan peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah. Efeknya, disparitas pendapatan semakin melebar yang bermuara pada peningkatan ketimpangan.

Peningkatan ketimpangan akan berpengaruh terhadap realisasi program pembangunan terutama program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan

kemiskinan tidak akan efektif tanpa memperhitungkan tingkat ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya jika ketimpangan dapat dikurangi maka angka kemiskinan dapat ditekan. Untuk Indonesia, penurunan koefisien gini sebesar 10 poin, akan setara dengan pengurangan masyarakat miskin hingga 1,7 Juta jiwa. Jika Gini *ratio* masih berada pada sekitaran 0,34 – 0,38 maka dalam jangka waktu 5 tahun kemiskinan akan mengalami peningkatan sampai 13 juta jiwa (Seery et al., 2014). Kondisi ini tidak dapat diabaikan oleh pemerintah sebagai otoritas fiskal ataupun bank sentral sebagai otoritas moneter. Tidak hanya akan mengurangi efektifitas program pengentasan kemiskinan, ketimpangan juga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang juga akan berimbas pada stabilitas fiskal dan moneter.

Menginvestigasi kebijakan ekonomi perlu dilakukan agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai secara optimal. Optimalitas tujuan kebijakan akan berimbas pada pengurangan ketimpangan dan selanjutnya akan dapat memperkuat kebijakan ekonomi itu sendiri (Stiglitz, 2013). Meskipun ketimpangan bukan *direct object* dari kebijakan moneter namun kebijakan moneter sangat potensial mempengaruhi ketimpangan. Karakteristik rumah tangga seperti usia, jenis pendapatan dan komposisi portfolio berkorelasi dengan pendapatan dan atau tingkat kekayaan dan berinteraksi dengan perubahan kebijakan moneter (Amaral, 2017). Banyak faktor lain yang juga harus diamati secara komprehensif untuk melihat bagaimana efek dari sebuah kebijakan moneter yang telah dijalankan.

1.2 Rumusan permasalahan

Ketimpangan adalah sumber dari heterogenitas. Semakin lebar ketimpangan akan menggambarkan semakin heterogen masyarakat dalam hal *marginal propensity to consume* (mpc), sumber pendapatan bahkan produktifitas tenaga kerja. *Heterogenous households* dan *magnitudenya* juga akan mempengaruhi transmisi kebijakan moneter. Secara teori, ketimpangan mempengaruhi fungsi *welfare-based loss function* dari otoritas moneter. Menurut fungsi ini kebijakan moneter yang optimal tidak dapat secara bersamaan menstabilkan *output gap* dan inflasi karena mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap ketimpangan (Motta dan Tirelli, 2013;

Coibion, 2011; Kumhof et al., 2015). Dalam kondisi standar, kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat konsumsi agregat kemudian mempengaruhi *output* dan inflasi. Perubahan tingkat konsumsi agregat yang sekaligus menggambarkan perubahan dalam biaya produksi dan akan mempengaruhi insentif untuk bekerja dan seterusnya menggerakkan indeks Gini. Disisi lain, dibawah ITF, kebijakan moneter kontraksi yang tidak diantisipasi dapat meningkatkan ketimpangan melalui penurunan *household labor income* (Brzoza-Brzezina. et al., 2013).

Hasil penelitian empiris memperlihatkan bahwa ada interaksi kebijakan moneter dengan indeks ketimpangan. Ketimpangan dapat menjadi fenomena yang dapat menghambat kebijakan moneter bekerja secara optimal. Hal ini menjadi dasar penting untuk melihat bagaimana sebenarnya hubungan antara kebijakan moneter dan ketimpangan, khususnya di Indonesia. Perlu diperhatikan pula apakah tingkat ketimpangan dapat menjadi salah satu transmisi kebijakan moneter dalam mencapai tujuan kebijakan moneter Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan menggunakan model *Dynamic Stochastic General Equilibrium* (DSGE), penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana respon optimal ketimpangan terhadap kebijakan moneter di Indonesia. Analisis *impulse response function* (*irf*) akan melengkapi pembahasan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan ketimpangan menjadi transmisi baru kebijakan moneter di Indonesia. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi bagaimana guncangan kebijakan moneter mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sebagai perbandingan, analisis juga dilengkapi dengan respon optimal ketimpangan terhadap kebijakan fiskal dan guncangan produktifitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan teori ekonomi makro dalam topik kebijakan moneter dan ketimpangan. Lebih jauh, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat

berkontribusi sebagai referensi dalam pengembangan model untuk analisis dan perumusan kebijakan moneter untuk negara dengan ekonomi terbuka kecil sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan moneter di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 6 (Enam) bagian yaitu;

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Literatur, menjelaskan tentang tinjauan dan kajian literatur tentang teori- teori, penelitian terdahulu yang relevan dengan ketimpangan pendapatan dan kebijakan moneter.

BAB III Kerangka Teoritis, menjelaskan konstruksi teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

BAB IV Metodologi Penelitian, menjelaskan derivasi dan inovasi model penelitian serta metode analisis yang akan digunakan.

BAB V Temuan Empiris, menjelaskan tentang hasil penelitian sesuai dengan data, model dan teknis analisis yang dikembangkan dalam penelitian.

BAB VI Kesimpulan, menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian.

